

## IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PERANNYA DALAM MEMPERKUAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Aulia Nur Rahmah<sup>1</sup>, Bahruddin<sup>2</sup>, Muhammad Abdian Abdillah<sup>3</sup>

Email: [aulianurrahma221200003@gmail.com](mailto:aulianurrahma221200003@gmail.com)<sup>1</sup>, [bahruddin.777@gmail.com](mailto:bahruddin.777@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[mabdianabdillah@gmail.com](mailto:mabdianabdillah@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

<sup>2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan  
Kode Pos 91112

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) serta perannya dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci, observasi langsung, serta telaah dokumen pendukung. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKD di BKD Kota Parepare telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan PP No. 71 Tahun 2010, meliputi proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang sistematis dan terintegrasi dengan aplikasi keuangan daerah berbasis teknologi. Implementasi SAKD terbukti memperkuat SPIP melalui peningkatan efektivitas pengawasan, keandalan data keuangan, serta efisiensi komunikasi antar unit kerja. Selain itu, penerapan SAKD berkontribusi langsung terhadap lima komponen utama SPIP menurut COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa SAKD berperan penting dalam memperkuat pengendalian intern pemerintah, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan implementasi kedua sistem tersebut bergantung pada komitmen pimpinan, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan teknologi informasi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas, Transparansi, Tata Kelola Pemerintahan.

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of the Regional Financial Accounting System (SAKD) and its role in strengthening the Government Internal Control System (SPIP) at the Regional Finance Agency (BKD) of Parepare City. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with three key informants, direct observation, and review of relevant documents. Data were analyzed through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of SAKD at BKD Parepare City complies with the provisions of Minister of Home Affairs Regulation No. 77 of 2020 and Government Regulation No. 71 of 2010, covering systematic processes of recording, summarizing, and reporting integrated with technology-based regional financial applications. The implementation of SAKD has strengthened SPIP by improving monitoring effectiveness, data reliability, and inter-unit communication efficiency. Moreover, SAKD contributes directly to the five key components of SPIP under the COSO framework: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. Overall, the results emphasize that the SAKD plays a crucial role in reinforcing the government's internal control system, fostering transparency, accountability, and effectiveness in regional financial management. The success of both systems relies on leadership commitment, human resource capacity, and the sustainable use of information technology.*

**Keywords:** Regional Financial Accounting System, Government Internal Control System,

***Accountability, Transparency, Good Governance.***

**PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan semangat desentralisasi, daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola keuangannya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan publik harus berpedoman pada asas efisiensi, efektivitas, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [15].

Untuk menjamin keandalan pengelolaan keuangan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem ini berfungsi mencatat, mengikhtisarkan, dan menyajikan transaksi keuangan secara sistematis serta terintegrasi. SAKD menjadi sarana penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [14]. Penerapan SAKD merupakan bagian dari reformasi keuangan daerah yang menuntut aparatur pemerintah untuk mampu memanfaatkan teknologi dan sistem informasi keuangan secara efektif. Implementasi yang baik akan meningkatkan keandalan laporan keuangan, mendukung pengambilan keputusan, serta memperkuat fungsi pengawasan internal [7]. Sebaliknya, jika SAKD belum berjalan optimal, maka risiko kesalahan pencatatan dan penyimpangan anggaran dapat meningkat.

Keberhasilan penerapan SAKD sangat berkaitan dengan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan sistem yang dibangun untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan [13]. Dengan adanya SPIP, aktivitas pengelolaan keuangan dapat dikendalikan agar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Hubungan antara SAKD dan SPIP bersifat saling mendukung. SAKD menghasilkan data keuangan yang akurat untuk kebutuhan pengawasan, sedangkan SPIP memastikan proses penyusunan dan pelaporan berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan. Integrasi antara kedua sistem ini menciptakan mekanisme pengendalian keuangan daerah yang lebih kuat [3].

Dalam praktiknya, penerapan SAKD di berbagai pemerintah daerah masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman terhadap standar akuntansi, dan kurangnya koordinasi antarunit kerja. Kondisi tersebut berdampak pada keandalan laporan keuangan serta efektivitas pengendalian intern [10]. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan komitmen organisasi dalam pelaksanaan SAKD. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, masih ditemukan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti ketidaktertiban pencatatan aset, kekeliruan penatausahaan, dan lemahnya pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan [2]. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas SAKD belum sepenuhnya optimal dalam memperkuat SPIP.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan sistem keuangan daerah. BKD bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Implementasi SAKD di instansi ini menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keandalan data keuangan dan efektivitas pengendalian intern [1]. Berdasarkan hasil observasi awal, penerapan SAKD di BKD Kota Parepare telah memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi yang memudahkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterlambatan input data, kesalahan teknis dalam sistem, serta keterbatasan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian intern. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih kuat antara sistem akuntansi dan sistem pengendalian [5].

Penerapan SAKD yang efektif diyakini mampu memperkuat lima komponen utama SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Melalui sistem akuntansi yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan [18]. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SAKD berpengaruh terhadap efektivitas SPIP dan kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah. Penelitian tersebut mengungkap bahwa sistem akuntansi yang dikelola dengan baik dapat menjadi alat pengendalian yang efektif dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik [\[17\]](#).

Dengan demikian, penting untuk meneliti lebih dalam bagaimana implementasi SAKD diterapkan di BKD Kota Parepare serta bagaimana sistem tersebut berperan dalam memperkuat SPIP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai sinergi antara sistem akuntansi dan pengendalian intern di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan perannya dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan kualitas tata kelola keuangan daerah

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diterapkan serta bagaimana perannya dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan [\[19\]](#), [\[12\]](#). Fokus penelitian diarahkan pada proses implementasi SAKD di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, termasuk mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan yang mendukung efektivitas SPIP. Penelitian ini juga menelaah hubungan antara pelaksanaan sistem akuntansi dengan lima komponen utama SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan [\[13\]](#).

Lokasi penelitian ditetapkan di BKD Kota Parepare, karena instansi ini berperan sebagai pelaksana utama pengelolaan keuangan daerah dan menjadi pusat penerapan sistem akuntansi serta pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa BKD Parepare telah menerapkan SAKD berbasis teknologi informasi terintegrasi, sehingga relevan untuk dikaji dari sisi implementasi dan dampaknya terhadap pengendalian intern [\[1\]](#).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memahami implementasi sistem akuntansi dan pengendalian intern, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi seperti laporan keuangan, hasil audit, peraturan perundang-undangan, dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah [\[11\]](#). Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling mengetahui permasalahan penelitian. Dalam hal ini, informan terdiri atas pejabat struktural di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, staf pelaksana penatausahaan keuangan, serta pejabat pengawas internal di BKD Kota Parepare [\[12\]](#).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung menggunakan panduan semi-terstruktur agar informasi yang diperoleh lebih mendalam namun tetap terarah. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait pelaksanaan pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis sistem. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk menelusuri bukti administratif dan arsip keuangan yang relevan [\[19\]](#), [\[4\]](#). Untuk menjaga kredibilitas data, penelitian ini menerapkan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini penting agar data yang diperoleh memiliki validitas tinggi dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan [\[16\]](#).

Proses analisis data dilakukan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyortir data relevan sesuai fokus penelitian; penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif; dan penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah [\[11\]](#). Peneliti juga memastikan prinsip etika penelitian diterapkan

dengan menjaga kerahasiaan identitas informan dan memperoleh izin resmi dari instansi terkait sebelum melakukan wawancara dan pengumpulan data. Hal ini sesuai dengan prinsip penelitian sosial yang menempatkan aspek kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab akademik sebagai prioritas utama [8].

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh mengenai bagaimana implementasi SAKD dapat memperkuat SPIP di lingkungan BKD Kota Parepare. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks hubungan antarvariabel secara mendalam, bukan hanya dari sisi prosedural, tetapi juga dari perspektif perilaku organisasi dan tata kelola pemerintahan [19], [11].

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diterapkan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare serta bagaimana sistem tersebut berperan dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan kunci yang terdiri atas Kepala Bidang Akuntansi, Staf Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Pengawas Internal BKD Parepare, serta melalui observasi dan telaah dokumen pelaporan keuangan daerah tahun 2022–2023 [9].

**Tabel 1. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di BKD Kota Parepare**

| Aspek Implementasi                   | Kondisi di BKD Kota Parepare                                    | Keterangan                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Struktur Organisasi Keuangan</b>  | Sudah terbentuk unit kerja khusus akuntansi dan pelaporan       | Mendukung pemisahan fungsi dan tanggung jawab            |
| <b>Sistem dan Prosedur Akuntansi</b> | Mengacu pada Permendagri No. 77/2020 dan SAP berbasis akrual    | Prosedur sudah terdokumentasi dengan baik                |
| <b>Teknologi dan Aplikasi</b>        | Menggunakan aplikasi keuangan daerah berbasis SIMDA dan SIPKD   | Terintegrasi dengan data kas, aset, dan laporan keuangan |
| <b>Sumber Daya Manusia (SDM)</b>     | Pegawai sebagian besar berlatar belakang akuntansi dan keuangan | Namun masih perlu pelatihan lanjutan                     |
| <b>Evaluasi dan Monitoring</b>       | Dilakukan setiap triwulan melalui rapat koordinasi keuangan     | Belum sepenuhnya berbasis data real-time                 |

*Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi BKD Kota Parepare (2024)*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa BKD Kota Parepare telah memiliki sistem dan prosedur akuntansi yang cukup baik dan terstruktur. Namun, dari aspek sumber daya manusia dan evaluasi sistem masih terdapat kendala teknis, terutama pada proses pelaporan yang belum sepenuhnya otomatis. Meskipun demikian, integrasi antara aplikasi keuangan daerah dan sistem informasi aset menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi BKD, pelaksanaan SAKD telah membantu mempercepat proses penyusunan laporan keuangan serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan. Auditor internal juga menyatakan bahwa penerapan sistem berbasis aplikasi memudahkan proses rekonsiliasi antarunit kerja. Namun, keterbatasan jaringan internet di beberapa waktu tertentu menjadi kendala dalam mengakses sistem secara simultan.

**Tabel 2. Ringkasan Hasil Wawancara dengan Informan Kunci**

| Informan          | Jabatan                   | Temuan Utama                                                              |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informan 1</b> | Kepala Bidang Akuntansi   | SAKD mempercepat proses pelaporan dan memperkuat fungsi kontrol keuangan  |
| <b>Informan 2</b> | Staf Penatausahaan        | Masih ada kendala teknis terkait kecepatan jaringan dan pembaruan sistem  |
| <b>Informan 3</b> | Pejabat Pengawas Internal | SAKD membantu mendeteksi kesalahan pelaporan sejak tahap awal pemeriksaan |

*Sumber: Hasil wawancara penelitian (2024)*

**Tabel 3. Keterkaitan Implementasi SAKD dengan Komponen SPIP**

| Komponen SPIP            | Dampak Implementasi SAKD                                       | Tingkat Efektivitas |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lingkungan Pengendalian  | Peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keuangan | Tinggi              |
| Penilaian Risiko         | Sistem membantu mendeteksi potensi kesalahan dalam transaksi   | Sedang              |
| Kegiatan Pengendalian    | Prosedur pencatatan dan verifikasi lebih terstandarisasi       | Tinggi              |
| Informasi dan Komunikasi | Aliran informasi keuangan antarunit lebih cepat dan transparan | Tinggi              |
| Pemantauan               | Evaluasi dilakukan rutin namun belum berbasis data otomatis    | Sedang              |

*Sumber: Analisis hasil wawancara dan dokumen BKD Parepare (2024)*

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa SAKD berperan besar dalam memperkuat SPIP, terutama pada aspek kegiatan pengendalian dan komunikasi informasi. Proses verifikasi keuangan yang sebelumnya manual kini dilakukan secara sistematis melalui aplikasi. Namun, pada aspek pemantauan masih diperlukan pengembangan sistem evaluasi berbasis *real-time* agar efektivitas SPIP dapat meningkat lebih optimal.

Selain itu, penerapan SAKD juga mendorong peningkatan integritas pegawai dalam menjalankan tanggung jawab keuangan. Setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem tercatat secara digital, sehingga dapat ditelusuri kembali (*audit trail*). Hal ini mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi pilar utama dalam pengendalian intern pemerintah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa komitmen pimpinan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi SAKD dan SPIP. Dukungan kepala BKD dalam bentuk monitoring, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada staf berpengaruh terhadap kedisiplinan dalam pelaporan dan kepatuhan terhadap prosedur keuangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa penerapan SAKD di BKD Kota Parepare berjalan cukup efektif dan berkontribusi dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah. Meskipun masih terdapat kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia, sistem ini telah membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## Pembahasan

### 1. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di BKD Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di BKD Kota Parepare telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan sistem ini mencakup kegiatan pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan secara terstruktur menggunakan aplikasi keuangan daerah berbasis teknologi [14].

Proses implementasi SAKD di BKD Parepare dilaksanakan melalui tahapan perencanaan sistem, pelatihan pegawai, dan penerapan penuh dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem tersebut telah membantu mempercepat proses penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan tahunan. Aplikasi keuangan yang digunakan (SIMDA dan SIPKD) telah terintegrasi dengan data kas, aset, dan anggaran, sehingga mempermudah proses rekonsiliasi antarunit kerja [7].

Implementasi SAKD juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi kerja aparatur, terutama dalam proses pelaporan dan penyesuaian data. Sebelum sistem ini diterapkan, pencatatan transaksi dilakukan secara manual, yang memerlukan waktu lama dan berisiko menimbulkan kesalahan input. Namun, dengan adanya SAKD, proses pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat, serta mudah untuk ditelusuri kembali jika terjadi kesalahan.

pencatatan [\[18\]](#).

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala, terutama terkait aspek sumber daya manusia dan jaringan sistem. Sebagian staf masih belum sepenuhnya memahami fitur aplikasi secara mendalam, sehingga terkadang terjadi keterlambatan dalam input data keuangan. Selain itu, keterbatasan sarana teknologi seperti koneksi internet yang tidak stabil di jam sibuk menjadi hambatan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pelaporan [\[1\]](#).

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SAKD sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, dan komitmen pimpinan organisasi. Faktor-faktor tersebut menjadi pondasi utama dalam membangun sistem akuntansi daerah yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori sistem akuntansi sektor publik yang menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh komitmen organisasi, kompetensi aparatur, dan efektivitas sistem pengendalian intern [\[9\]](#).

## 2. Peran SAKD dalam Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKD memiliki peran signifikan dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BKD Kota Parepare. SAKD berperan sebagai alat yang memastikan transaksi keuangan dicatat, diverifikasi, dan dilaporkan secara akurat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sistem ini menjadi bagian integral dari mekanisme pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah [\[13\]](#).

Dari hasil analisis, dapat dilihat bahwa SAKD memberikan dampak positif pada lima komponen utama SPIP, yaitu: (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko, (c) kegiatan pengendalian, (d) informasi dan komunikasi, dan (e) pemantauan. Misalnya, pada komponen lingkungan pengendalian, penerapan SAKD mendorong peningkatan disiplin aparatur dalam mengikuti prosedur keuangan yang berlaku. Pada komponen informasi dan komunikasi, sistem ini memungkinkan pertukaran data antarunit kerja dilakukan secara cepat dan terintegrasi.

Selain itu, sistem akuntansi juga memperkuat kegiatan pengendalian dengan menciptakan mekanisme *check and balance* dalam setiap tahap pelaporan. Setiap transaksi yang dicatat dalam aplikasi keuangan daerah terekam secara otomatis, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian data, sistem dapat memberikan notifikasi peringatan. Hal ini mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti dari SPIP.

Temuan penelitian ini sejalan dengan kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) yang menekankan pentingnya sistem informasi dan pengendalian internal yang terintegrasi untuk mencapai efektivitas organisasi [\[3\]](#). Dalam konteks pemerintah daerah, SAKD berperan sebagai “motor penggerak” yang menyediakan data *real-time* untuk mendukung kegiatan pengawasan, audit, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, sinergi antara SAKD dan SPIP merupakan prasyarat penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pengawas internal BKD, penerapan SAKD juga memperkuat fungsi audit internal. Setiap bukti transaksi kini tersimpan secara digital dan dapat diakses kembali sewaktu-waktu untuk proses pemeriksaan. Hal ini memudahkan auditor dalam menelusuri kesalahan maupun penyimpangan pada laporan keuangan. Auditor internal juga menyatakan bahwa tingkat keandalan data keuangan meningkat setelah penggunaan sistem berbasis aplikasi diterapkan [\[5\]](#).

Walaupun demikian, tantangan masih muncul pada aspek pemantauan dan penilaian risiko, karena proses evaluasi belum dilakukan secara *real-time*. Hal ini dikarenakan sistem pelaporan masih mengandalkan input manual dari beberapa unit kerja sebelum data diunggah ke server pusat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh fungsi pengawasan ke dalam satu platform terpadu [\[10\]](#), [\[18\]](#).

Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAKD berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas SPIP, khususnya dalam aspek pelaporan keuangan dan kegiatan pengendalian. Dengan dukungan teknologi, sistem ini tidak hanya berfungsi

administratif, tetapi juga menjadi sarana kontrol yang kuat bagi pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem akuntansi berbasis aplikasi dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan akurasi laporan, dan memperkuat fungsi pengawasan internal [20].

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi SAKD di BKD Kota Parepare telah memberikan dampak positif dalam memperkuat SPIP, terutama melalui peningkatan efektivitas pelaporan, efisiensi komunikasi antarunit, serta keandalan data keuangan. Namun, peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan sistem berbasis *real-time* masih menjadi tantangan utama yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Perannya dalam Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAKD telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap tata kelola keuangan daerah.

Implementasi SAKD di BKD Kota Parepare telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mencakup proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi. Sistem ini terbukti meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi pelaporan keuangan, sehingga mendukung terciptanya akuntabilitas publik.

Penerapan SAKD berperan penting dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini terlihat dari meningkatnya efektivitas pada lima komponen utama SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sistem ini juga membantu mendeteksi kesalahan lebih cepat dan meningkatkan keterpaduan antarunit kerja dalam proses pengawasan keuangan.

Meskipun implementasi SAKD menunjukkan hasil yang baik, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem secara optimal serta belum terintegrasinya sistem pemantauan secara *real-time*. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan SAKD di BKD Kota Parepare telah menjadi instrumen utama dalam memperkuat SPIP dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### Saran

1. Pemerintah Daerah dan BKD Kota Parepare perlu terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan agar pemahaman terhadap SAKD dan SPIP semakin optimal.
2. Diperlukan pengembangan sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi secara *real-time*, agar proses pengendalian dan pemantauan dapat dilakukan lebih efektif serta mengurangi potensi kesalahan pencatatan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti kompetensi aparatur, komitmen organisasi, atau dukungan teknologi informasi, untuk memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. (2023). *Laporan Kinerja BKD Tahun 2023*. Parepare: BKD Kota Parepare.
- [2] Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023*.
- [3] COSO. (2017). *Internal Control — Integrated Framework*. USA: COSO Publications.
- [4] Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2023). Revisiting mixed methods research designs twenty years later. *Handbook of mixed methods research designs*, 1(1), 21-36.

- [5] Data Observasi dan Wawancara Peneliti di BKD Kota Parepare (2024).
- [6] Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- [7] Kementerian Dalam Negeri RI. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- [8] Jailani, M. S. (2023). Memahami Etika Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 24-29.
- [9] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- [10] Fatimah, F., Harun, H., & Musdalifah, M. (2023). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM MEMPERKECIL RESIKO PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT. NUSA SURYA CIPTADANA CABANG MAMUJU. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10.
- [11] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). London: SAGE Publications.
- [12] Moleong, L. J. (2022). A. Jenis dan Pendekatan Penelitian. *Salema Empat*.
- [13] Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- [14] Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- [15] Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- [16] Pratama, R., & Lestari, N. (2022). Penerapan triangulasi sumber dan metode dalam penelitian kebijakan publik: Studi pada evaluasi kinerja aparatur pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 215–222.
- [17] Tanzerina, D., Rasuli, M., & Al Azhar, L. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Satuan Kerja P* (Doctoral dissertation, Riau University).
- [18] Indrayani, K. D. (2019). *Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi* (Doctoral dissertation, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA).
- [19] MSDM, I. Sugiyono.(2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Sianipar, R., & Salim, V.(2019). Faktor Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Dalam Membentuk 'Loyalitas Kerja'Pegawai Pada Pt Timur Raya Alam Damai. Anuar, S. 2019. Th. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(6), 3674.
- [20] Bulan, S. G. I., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. (2017). Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Efektivitas

Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01).